BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi (Agency Theory)

Pada tahun 1976 Jensen & Meckling yang mengembangkan bahwa teori agensi merupakan perjanjian atau kesepakatan antara satu individu atau lebih. Teori agensi atau agency theory sering didefinisikan sebagai bentuk hubungan kontraktual antara beberapa pihak atau lebih di dalam suatu entitas, dengan peran yang berbeda yaitu sebagai prinsipal dan juga agen. Prinsipal dan agen tentunya memiliki kepentingan yang berbeda. Prinsipal adalah para investor atau dalam sektor konstruksi merupakan pemilik proyek atau pemegang saham yang telah memberikan kepercayaan atas pengelolaan sumber daya perusahaan kepada agen. Berbeda dengan agen, agen ialah para manajemen perusahaan atau kontraktor yang berperan secara operasional untuk mengelola sumber daya yang telah dipercayakan oleh prinsipal.

Teori agensi akan timbul saat adanya perjajian antara kedua belah pihak untuk melakukan tindakan diatas. Adanya perjanjian tersebut dapat menciptakan peluang terjadinya *conflict of interest* antara prinsipal dan agen, khususnya antara investor dan manajemen. Investor biasanya memiliki tujuan utama untuk memperoleh return yang tinggi dari investasinya di perusahaan. Jika tujuan tersebut tercapai, investor cenderung menambahkan lebih banyak sumber daya ke perusahaan tersebut. Sementara itu, manajemen memiliki tujuan agar perusahaan tetap beroperasi secara berkelanjutan (*going concern*).

Terdapat hubungan yang saling mendukung antara keduanya, kinerja perusahaan yang baik akan meningkatkan kepercayaan investor untuk terus menginvestasikan dananya, sehingga mendukung keberlanjutan perusahaan. Dalam situasi ini, manajemen memiliki dorongan untuk memastikan bahwa kinerja perusahaan dinilai positif oleh investor, karena hal tersebut dapat memberikan manfaat bagi perusahaan untuk tetap bertahan dan berkembang. Dengan demikian, manajemen akan berusaha semaksimal mungkin agar menunjukkan kinerja yang meyakinkan di mata para pemangku kepentingan. Menurut Eisenhardt, teori agensi merupakan suatu pendekatan yang menekankan pada permasalahan akibat adanya perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen yang sering kali diwarnai oleh konflik kepentingan, asimetri informasi, dan pengambilan keputusan yang tidak bertanggung jawab.

Manajemen tentu memiliki informasi yang lebih banyak dibanding pihak external yaitu investor. Hal ini terjadi dikarenakan manajemen yang melakukan pengelolaan dalam perusahaan, manajemen yang mengetahui operasional perusahaan seperti apa. Sedangkan investor hanya mengetahui apa yang dilaporkan oleh manajemen saja. Perbedaan informasi yang dimiliki oleh keduanya dikenal dengan sebutan asismetri informasi. Perbedaan informasi ini lah yang dapat menimbulkan potensi manajemen berbuat curang demi "mempercantik" hasil kinerjanya menggunakan laporan keuangan.

Asimetri informasi terjadi ketika agen memiliki lebih banyak informasi mengenai progres proyek, biaya, dan tantangan operasional dibandingkan dengan prinsipal Nugroho & Murtanto (2024). Selain itu, pengambilan keputusan yang

tidak bertanggung jawab dapat terjadi ketika agen membuat keputusan yang berisiko, seperti mencatat pendapatan fiktif atau menunda pengakuan beban, karena mereka tidak sepenuhnya menanggung konsekuensi dari tindakannya.

Konflik kepentingan juga kerap terjadi, di mana agen lebih fokus pada keuntungan jangka pendek, sementara prinsipal mengutamakan keberlanjutan proyek dan stabilitas keuangan jangka panjang. Dalam konteks ini, tata kelola perusahaan yang baik, seperti keberadaan Komite Audit dan dewan komisaris independen, menjadi mekanisme penting untuk mengurangi konflik keagenan Dwianto et al. (2024). Pengawasan yang ketat melalui audit internal dan eksternal, serta pemberian insentif berbasis kinerja proyek, dapat membantu memastikan transparansi laporan keuangan dan meminimalkan pengambilan keputusan yang tidak bertanggung jawab.

Relevansi teori ini semakin kuat dalam penelitian yang mengkaji kecurangan laporan keuangan di sektor konstruksi, karena elemen-elemen *fraud* seperti tekanan dan kesempatan sering kali dipengaruhi oleh kondisi agensi dalam perusahaan. Dalam kondisi *financial distress*, manajemen juga cenderung memanfaatkan adanya asimetri informasi untuk memanipulasi laporan keuangan demi mempertahankan citra perusahaan. Peran Komite Audit menjadi sangat penting untuk memoderasi hubungan ini, sehingga transparansi dan akuntabilitas perusahaan dapat terjaga.

2.1.2 Laporan Keuangan (Financial Reporting)

a. Definisi Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah gambaran menyeluruh dari seluruh aktivitas keuangan perusahaan selama periode tertentu, mencakup transaksi dengan berbagai pihak yang terkait dengan operasionalnya serta peristiwa penting yang terjadi. Ketika disusun dengan akurat dan transparan, laporan keuangan menjadi alat vital yang memberikan wawasan berharga, terutama bagi manajemen perusahaan, untuk mendukung pengambilan keputusan strategis yang tepat dan berbasis data.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK), susunan laporan keuangan umumnya memberikan suatu gambaran tentang kinerja keuangan yang ditujukan untuk para pemangku kepentingan, seperti pemilik, investor, kreditur, dan pihak terkait lainnya. Laporan keuangan juga digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja, melihat dan meilai posisi keuangan perusahaan dan aliran kas perusahaan.

Menurut beberapa ahli, laporan keuangan merupakan alat penting untuk menggambarkan kondisi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Santoso (2009) menjelaskan bahwa laporan keuangan memberikan informasi tentang posisi keuangan (neraca) dan hasil usaha (laporan laba rugi) perusahaan. Kasmir (2013) menambahkan bahwa laporan keuangan menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Senada dengan itu, Sadeli (2011) mengungkapkan bahwa laporan keuangan adalah laporan tertulis yang memberikan informasi kuantitatif tentang posisi keuangan serta perubahannya. Harahap (2013) menyatakan bahwa laporan keuangan mencerminkan kondisi keuangan dan hasil usaha perusahaan dalam waktu tertentu, sementara Yadiati (2010) menekankan

bahwa laporan keuangan juga berfungsi sebagai alat komunikasi dan pertanggungjawaban manajemen kepada pihak-pihak yang membutuhkan, dalam penelitian Wicaksana (2016).

Kesimpulan dari berbagai pengertian laporan keuangan menurut para ahli adalah bahwa laporan keuangan merupakan dokumen formal yang menyajikan informasi kuantitatif mengenai posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu entitas selama periode tertentu. Dalam konteks sektor konstruksi, laporan keuangan memiliki peran yang sangat penting karena sifat industri ini yang kompleks, melibatkan proyek-proyek jangka panjang, pembiayaan besar, serta pengelolaan berbagai kontrak.

Laporan keuangan pada sektor konstruksi tidak hanya mencerminkan kondisi keuangan perusahaan tetapi juga menjadi alat komunikasi dan pertanggungjawaban manajemen kepada investor, kreditur, dan pihak terkait lainnya. Dengan menyajikan informasi keuangan yang akurat, laporan ini mendukung pengambilan keputusan strategis, seperti alokasi sumber daya, perencanaan proyek, dan mitigasi risiko dalam menyelesaikan proyek konstruksi.

b. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keungan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan.

Menurut Kasmir 2019 laporan keuangan memiliki tujuan untuk menginformasikan kondisi keuangan perusahaan kepada pemangku kepentingan. Tujuan laporan menurut Kasmir 2019, antaralainnya:

- 1. Laporan keuangan memberi informasi jenis dan jumlah aktiva.
- 2. Laporan keuangan memberi informasi jenis dan jumlah kewajiban serta modal.
- Laporan keuangan memberi informasi jenis dan jumlah pendapatan yang di dapatkan selama periode tertentu.
- 4. Laporan keuangan memberi informasi jumlah dan jenis biaya yang di keluarkan.
- 5. Laporan keuangan memberi informasi perubahan yang terjadi pada aktiva, pasiva, dan modal.
- 6. Laporan keuangan perusahaan memberi informasi CaLK dalam periode tertentu.

Secara umum tujuan utama laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu entitas yang berguna bagi berbagai pihak dalam pengambilan keputusan ekonomi. Selain itu, laporan keuangan juga berperan dalam menunjukkan akuntabilitas manajemen (stewardship) serta pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada mereka.

Laporan ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan umum sebagian besar pengguna, termasuk pihak-pihak yang berkepentingan, salah satunya dalam sektor konstruksi yang menyajikan dampak keuangan dari peristiwa masa lalu. Dalam sektor konstruksi, laporan keuangan berperan penting dalam memberikan

gambaran mengenai penggunaan sumber daya, kinerja proyek, dan kondisi keuangan perusahaan konstruksi.

Laporan keuangan tidak mencakup semua informasi yang mungkin diperlukan pengguna dalam pengambilan keputusan, karena fokus utamanya adalah data keuangan historis dan tidak mencakup informasi non-keuangan, seperti risiko operasional, kualitas proyek, atau aspek keberlanjutan dalam konstruksi.

c. Pemakai Laporan Keuangan

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), pemakai laporan keuangan ialah para investor, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok, dan kreditur usaha, pelanggan, pemerintah serta lembaganya, dan masyarakat. Laporan keuangan menjadi alat penting untuk memenuhi kebutuhan informasi beragam pihak yang memiliki kepentingan terhadap kondisi dan kinerja perusahaan.

d. Komponen Laporan Keuangan

Komponen laporan keuangan diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan. Pada PSAK komponen laporan keuangan terdiri dari lima macam yaitu, Laporan Laba/Rugi, Neraca, Laporan Perubahan Modal, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Kelima komponen tersebut saling melengkapi untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi keuangan dan kinerja sebuah perusahaan, termasuk dalam sektor konstruksi yang memiliki karakteristik unik.

2.1.3 Kecurangan Laporan Keuangan (Fraudulent Financial Reporting)

Menurut Association of Certified Fraud Examiners Indonesia (2019), kecurangan laporan keuangan dapat didefinisikan sebagai berikut:

"Financial statement Fraud is the deliberate misrepresentation of the financial condition of an enterprise accomplished through the intentional misstatement or omission of amounts or disclosures in the financial statements to deceive financial statement users."

Kecuranga laporan keuagan adalah bentuk salah saji kondisi keuangan perusahaan yang dilakukan secara sengaja, penghilangan material informasi, atau salah pengungkapan dalam laporan keuangan untuk menipu penggunanya. Kecurangan laporan keuangan sering dilakukan dengan cara melebih-lebihkan nilai aset, pendapatan, atau laba, serta *understatement liability*, beban, atau kerugian yang dialami perusahaan. Selain itu, perusahaan juga dapat melakukan manipulasi dengan menunda pengakuan pendapatan yang meningkat tajam pada suatu periode, guna menciptakan kesan peningkatan pendapatan di periode berikutnya.

Menurut SAS No.99, *financial statement fraud* dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lainnya:

- Manipulasi, pemalsuan, atau perubahan catatan akuntansi, dokumen pendukung dari laporan keuangan yang disusun.
- 2. Kekeliruan atau kelalaian yang disengaja dalam informasi yang signifikan terhadap laporan keuangan.
- Melakukan secara sengaja penyalahgunaan prinsip prinsip yang berkaitan dengan jumlah, klasifikasi, cara penyajian, atau pengungkapan.

Deteksi terhadap kecurangan laporan keuangan perlu disegerakan karena berhubungan langsung dengan keakuratan informasi yang disajikan kepada penggunanya dan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan perusahaan. Penelitian ini berfokus pada laporan keuangan tahunan BUMN sektor konstruksi, dengan tujuan mendeteksi tingkat kecurangan yang terjadi, mengingat banyaknya kasus manipulasi laporan keuangan yang ditemukan di sektor tersebut.

Perlu dibedakan bahwa *fraud* berbeda dengan kesalahan yang tidak disengaja. Kesalahan pencatatan transaksi yang terjadi tanpa disadari tidak termasuk katarogansiri *fraud*, karena tidak ada unsur kesengajaan dalam tindakan tersebut.

2.1.4 Teori Kecurangan (Fraud Theory)

Menurut *Black Law's Dictionary*, *fraud* didefinisikan sebagai tindakan menyampaikan informasi yang salah secara sengaja dengan menyembunyikan fakta sebenarnya untuk mencapai tujuan tertentu, yang pada akhirnya merugikan pihak lain. Pendapat lainnya dikemukakan oeh Brazil et al., (2019) bahwa kecurangan adalah istilah umum yang mencakup berbagai cara licik yang dirancang individu untuk memperoleh keuntungan dengan menyampaikan informasi yang tidak sesuai. Bentuk kecurangan sangat beragam, mulai dari manipulasi hingga tipu daya, dan hanya dibatasi oleh sejauh mana manusia mampu merancang tindakan tersebut.

Menurut ACFE (Association of Certified Fraud Examiners), terdapat tiga katarogansiri kecurangan, antara lainnya:

- Korupsi, merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pihak yang bekerjasama dengan oknum lain dengan meyalahgunakan posisinya dalam suatu entitas untuk saling menikmati keuntungan yang didapat.
- Penyelewengan aset, merupakan tindakan mencuri atau meggunakan sumber daya perusahaan tanpa izin yang dilaukan oleh pihak atau karyawan

- perusahaan. Kecurangan ini cukup mudah terdeteksi dikarenakan sifat objeknya yang berwujud dan mudahnya akses untuk menelusuri.
- 3. Financial statement fraud, tindakan menyajikan informasi keuangan yang menyesatkan dengan memberikan data yang tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Tindakan ini bertujuan untuk menciptakan persepsi positif terhadap kinerja perusahaan di mata para pemangku kepentingan (stakeholders).

2.1.5 Fraud Hexagon



Gambar 2.1 Fraud Hexagon Theory

Model pendeteksi *fraud* terbaru ditemukan oleh Vousinas (2019) yang telah dikembangkan sebagai penyempurnaan dari model *Fraud Triangle* dan *Fraud Pentagon*. Georgios L. Vousinas menggunakan S.C.O.R.E. Model dengan menambahkan kolusi sebagai elemen terbaru. Keenam elemen penyebab terjadinya *fraud* yang dicetuskan oleh Georgios L. Vousinas ini disebut dengan teori *Fraud hexagon*. Tercetus teori ini dikarenakan tingginya kasus *fraud* dalam beberapa kurun waktu terakhir yang dilatarbelakangi oleh adanya perjanjian antara beberapa pihak dengan tujuan untuk merugikan pihak tertentu.

Teori *fraud hexagon* menjelaskan bahwa terjadinya kecurangan (*fraud*) dapat dipengaruhi oleh adanya *pressure*, *opportunity*, *rationalization*, *capability*, *arrogance* dan *collusion* Nurbaiti & Putri (2023). Berikut merupakan penjelasan unsur – unsur dalam teori *fraud hexagon*:

4.2.1 Tekanan (*Pressure*)

Pada aspek kehidupan, seseorang akan melakukan kecurangan atau penipuan pada perusahaan karena adanya suatu dorongan atau sebuah tekanan yang menyebabkan para pelaku terpaksa melakukannya. Permasalahan finansial, hutang piutang yang terlilit, dan sikap serakah untuk memenuhi kepuasan pribadi merupakan faktor seseorang dapat melakukan *fraud*. Terdapat empat indikator *pressure* yang memotivasi sesorang melakukan kecurangan, yaitu: *external pressure*, *financial target*, *financial stability*, dan *personal financial needs*.

4.2.2 Peluang (*Opportunity*)

Ketika tidak ada pengawasan dan kurang efektifnya pengendalian internal dalam perusahaan dapat membuka sebuah peluang untuk melakukan kecurangan serta penyalahgunaan jabatan dan aturan akuntansi juga berpengaruh terhadap kecurangan yang terjadi Ika Ristianingsih (2017). Semakin kecil resiko untuk diketahui dan dideteksi maka akan semakin mudah peluang diambilnya tindakan ftersebut. Berikut beberapa faktor yang menyebabkan munculnya kesempatan: pengawasan yang tidak efektif, karakteristik industri, pergantian dewan direksi, dan jabatan direktur ganda.

4.2.3 Kemampuan (*Capability*)

Individu yang memiliki jabatan Chief Executive Officer (CEO) atau pemimpin dapat menjadi faktor penipuan pentagon dalam unsur capability karena individu dalam peran tersebut dapat menggunakan jabatan mereka untuk memengaruhi orang lain untuk melakukan penipuan (Nindito, 2018). Karyawan dapat memanipulasi pengendalian internal, memperbaharui strategi yang canggih untuk melakukan *fraud* demi memperoleh keuntungan. Ada 4 faktor yang dapat menunjukkan kemampuan seseorang, yaitu masa jabatan, usia, pendidikan, dan adanya pergantian CEO.

4.2.4 Rasionalisasi (*Rationalization*)

Sikap pembenaran sering ditemukan pada aspek sosial maupun finansial. Ketika orang lain melakukan kecurangan pada perusahaan, seseorang akan mengikuti perbuatan licik tersebut dan melakukan pembenaran bahwa melakukan tindakan *fraud* itu wajar dan tidak salah. Indikator dalam *rationalization* antara lain adalah *auditor switch, auditor opinion, related party transaction,* dan *founder's board*.

4.2.5 Arogansi (*Arrogance*)

Arogansi adalah sebuah perilaku yang mementingkan diri sendiri atas hak yang dimiliki serta tidak mempedulikan pengendalian internal, peraturan dan kebijakan pada suatu perusahaan. Sikap superioritas yang menyebabkan keserakahan dari orang yang percaya bahwa pengendalian internal tidak berlaku secara pribadi, merasa lebih tinggi kedudukannya ketimbang pihak lainnya. Arogansi dapat

didorong oleh beberapa faktor, antaralainnya: narsisme CEO, koneksi politik, dan frekuensi jumlah foto CEO

4.2.6 Kolusi (Collusion)

Kolusi adalah bentuk kerjasama beberapa pihak baik antar sesama individu di dalam suatu organisasi atau dengan pihak luar organisasi menurut Vousinas 2019, dalam penelitian Oktavia, Bahari, and Kartika (2022). Enron, Woldcom dan Parmalat membenarkan bahwa Kolusi merupakan elemen sentral dalam banyak penipuan yang kompleks dalam kejahatan keuangan.

Implikasi teori *fraud* hexagon dalam penelitian ini adalah menunjukkan masih banyaknya kecurangan yang ditemukan dalam laporan keuangan BUMN sektor konstruksi, seperti kasus yang telah dipaparkan pada latar belakang penelitian. Dengan memahami faktor-faktor yang dapat memicu terjadinya *fraud*, diharapkan para pengelola keuangan di BUMN sektor konstruksi dapat meningkatkan transparansi, memperbaiki tata kelola, dan mengelola keuangan perusahaan dengan lebih baik.

Hal ini bertujuan untuk memastikan laporan keuangan mencerminkan kondisi sebenarnya dan mendukung stabilitas sektor konstruksi di Indonesia.

4.2.7 Financial Distress

Financial distress menurut Theodossiou 1999 dalam Putri Thogamas & Hariadi (2023) merupakan suatu kondisi perusahaan yang sedang mengalami penurunan pertumbuhan, penurunan aset tetap, dan laba. Mardiana (2015) berpendapat bahwa financial distress merupakan salah satu faktor berpengaruh atas

terjadinya laporan keuangan. *Financial distress* adalah kondisi di mana perusahaan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban keuangannya.

Situasi ini mencerminkan ketidakmampuan perusahaan untuk menjaga kesehatan keuangannya secara fundamental, yang dapat berujung pada krisis, penurunan kinerja, atau bahkan kebangkrutan dan likuidasi. Secara umum, *financial distress* terjadi sebelum perusahaan menghadapi kondisi ekstrem seperti likuidasi atau kebangkrutan legal, Curry & Banjarnahor (2018).

Putri Thogamas & Hariadi (2023) menjelaskan lima jenis yang umum diidentifikasikan terakit *financial distress*, antaralainnya:

- 1. *Economic Failure*, ketika pendapatan perusahaan tidak cukup untuk menutupi biaya ekonomisnya.
- 2. Business Failure, ketika perusahaan tidak dapat terus beroperasi karena kegagalan bisnis.
- 3. *Technical Insolvency*, ketika perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya saat jatuh tempo.
- 4. *Insolvency in Bankruptcy*, kondisi di mana kewajiban perusahaan melebihi total asetnya.
- 5. *Legal Bankruptcy*, ketika perusahaan secara resmi dinyatakan bangkrut oleh pengadilan.

Financial distress dapat diprediksi dengan menganalisis rasio keuangan dan informasi non-keuangan, yang bersumber dari laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, serta catatan tambahan lainnya dalam laporan keuangan. Beberapa metode analisis telah dikembangkan untuk memprediksi

kemungkinan kebangkrutan serta mendeteksi kecurangan dalam laporan keuangan, termasuk metode *Altman Z-Score* dan *Beneish M-Score*.

Altman Z-Score, menurut Magdalena & Tanusdjaja dalam Pratama & Puspitasari (2022) adalah alat analisis yang dirancang untuk memprediksi kemungkinan kebangkrutan suatu perusahaan. Metode ini mengkatarogansirikan perusahaan ke dalam tiga kelompok berdasarkan hasil perhitungan skor:

- Skor > 2,99: Perusahaan dianggap sehat secara finansial.
- Skor 1,81 2,99: Perusahaan berada di "zona abu-abu," yang berarti berisiko tetapi belum menunjukkan tanda-tanda jelas kebangkrutan.
- Skor < 1,81: Perusahaan berada dalam kondisi berpotensi tinggi untuk mengalami kebangkrutan.

Altman Z-Score menjadi salah satu pendekatan populer untuk menilai kesehatan keuangan perusahaan secara kuantitatif dan telah banyak digunakan dalam penelitian.

Beneish M-Score adalah metode analisis yang dikembangkan oleh Messod D. Beneish untuk mendeteksi potensi manipulasi laporan keuangan (financial fraud). Teori ini pertama kali diperkenalkan melalui artikel berjudul "The Detection of Earnings Manipulation" pada tahun 1999 dan terus digunakan hingga saat ini dalam berbagai penelitian untuk mendeteksi kecurangan laporan keuangan.

Metode ini menggunakan *Beneish Ratio Index* untuk menghasilkan nilai *M-Score*, yang memiliki kriteria berikut:

 M-Score > -2,22: Mengindikasikan adanya kemungkinan kecurangan laporan keuangan. M-Score ≤ -2,22: Perusahaan dianggap tidak menunjukkan tanda manipulasi laporan keuangan.

Penelitian menunjukkan bahwa metode *Beneish M-Score* masih efektif digunakan untuk mendeteksi kecurangan, seperti yang ditunjukkan dalam studi oleh Andi Ghazali (2020)

Metode *Altman Z-Score* dan *Beneish M-Score* memberikan pendekatan komprehensif untuk menganalisis kesehatan keuangan dan mendeteksi kecurangan laporan keuangan. *Altman Z-Score* lebih berfokus pada prediksi kebangkrutan melalui rasio keuangan, sedangkan *Beneish M-Score* membantu mengidentifikasi manipulasi laporan keuangan. Kedua metode ini saling melengkapi dalam membantu perusahaan dan pemangku kepentingan menjaga transparansi dan mengelola risiko keuangan.

2.1.6 Good Corporate Governance (GCG)

Menurut Organization of Economic Coorperation and Development (OECD) (2016) berpendapat bahwa prinsip dari Corporate Governance dimaksudkan untuk membantu pembuat kebijakan dalam mengevaluasi dan memperbaiki kerangka hukum, peraturan, serta kelembagaan yang mendukung tata kelola perusahaan. Langkah ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi ekonomi, mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan, dan menjaga stabilitas keuangan.

Menurut Forum For Corporate Governance In Indonesia (FCGI), tujuan utama penerapan Good Corporate Governance (GCG) adalah menciptakan value-added bagi para pemangku kepentingan (stakeholders). Nilai tambah ini diwujudkan melalui peningkatan modal perusahaan, yang terjadi karena kepercayaan investor

yang lebih tinggi, serta rendahnya *cost of capital* akibat pengelolaan risiko yang lebih baik sehingga mempermudah akses ke sumber pendanaan.

Selain itu, GCG juga mendorong peningkatan kinerja bisnis perusahaan melalui operasional yang lebih efisien dan efektif. Tata kelola yang baik juga berdampak positif terhadap harga saham perusahaan di pasar modal, menciptakan persepsi positif di kalangan investor dan masyarakat. Dengan penerapan GCG yang konsisten, perusahaan dapat mencapai keberlanjutan bisnis sekaligus memberikan manfaat yang signifikan bagi semua pemangku kepentingan.

Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), menetapkan lima prinsip utama *Good Corporate Governance* (GCG): transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar tata kelola yang baik di BUMN untuk mendukung profesionalisme, kepatuhan, dan keadilan dalam pengelolaan perusahaan.

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dilakukan melalui lima mekanisme utama:

a. Kepemilikan Manajerial

Mengacu pada partisipasi manajemen dalam struktur modal perusahaan yaitu sebagai manajer sekaligus pemegang proporsi saham perusahaan. Kepemilikan ini mendorong manajemen untuk bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham, sehingga mengurangi potensi kecurangan dalam laporan keuangan untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan, Ihsantil & Cheisviyanny (2023).

b. Kepemilikan Institusional

Pemegang saham terbesar, yang sering kali berasal dari kepemilikan institusional, memiliki peran penting dalam memastikan pengelolaan perusahaan yang transparan dan akuntabel. Melalui partisipasi aktif dalam rapat perusahaan dan kegiatan lainnya, mereka dapat menjalankan fungsi pengawasan secara efektif. Pemegang saham terbesar juga memiliki kekuatan untuk menuntut manajemen agar menjalankan prinsip transparansi dan kewajaran dalam pengelolaan perusahaan, Kurnia (2023).

Kepemilikan institusional juga memiliki peran penting dalam meminimalkan konflik keagenan antara manajer dan pemegang saham. Pemegang saham institusional, terutama yang memiliki porsi besar, aktif dalam mengawasi pengelolaan perusahaan melalui rapat dan kegiatan lainnya. Mereka dapat menuntut pengelolaan yang transparan dan wajar, sehingga mendukung prinsip akuntabilitas dalam tata kelola perusahaan.

Menurut Jensen & Meckling (1976) investor institusional berfungsi sebagai mekanisme monitoring yang efektif dalam pengambilan keputusan strategis. Semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional, semakin besar kontrol eksternal terhadap perusahaan, yang pada akhirnya dapat mengurangi biaya keagenan dan kecurangan laporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen.

c. Dewan Komisaris Independen

Menurut Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, dewan komisaris merupakan organisasi perseorangan yang bertugas melaksanakan pengawasan secara umum dan khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi

bimbingan kepada direksi. Menurut Wahyudi & Dewayanto (2023), anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen atau pemegang saham mayoritas. Mereka berfungsi sebagai pengawas independen yang memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan, serta mencegah praktik kecurangan. Dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan atas proses berjalannya perusahaan sesuai dengan lanadasan seluruh asas GCG.

Kewajiban lainnya ialah berperan sebagai pengawas performa dewan direksi dalam bekerja serta mengontrol implementasi kebijakan dewan direksi tersebut Kemampuan perusahaan dalam pemenuhan tugas akan meningkat dengan bertambahnya jumlah komisaris independen. Independensi komisaris setidaknya 30% dari total keseluruhan anggotanya di mana harus independen, yang harus sesuai dengan jumlah kepemilikan investor di perusahaan Lukito & Abubakar Arief (2024)

d. Dewan Direksi

Tuti (2012) melalui Pedoman Penerapan GCG mejelaskan, Dewan Direksi merupakan tim eksekutif yang bertanggung jawab atas operasional sehari-hari perusahaan. Organ perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Direksi juga mewakili perusahaan di dalam maupun di luar pengadilan.

Tugas utama Direksi meliputi menjalankan pengurusan perusahaan, menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan, membentuk komite pendukung, serta bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian mereka. Selain itu, Direksi memiliki wewenang untuk mengambil kebijakan yang dianggap tepat dan mewakili perusahaan di berbagai forum resmi. Penerapan praktik GCG yang baik oleh dewan direksi dapat meningkatkan integritas laporan keuangan dan meminimalkan risiko kecurangan.

e. Komite Audit

Komite Audit merupakan komite yang berperan cukup penting dalam tata kelola perusahaan. Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk mendukung pengawasan, khususnya terkait pelaporan keuangan, audit internal dan eksternal, serta kepatuhan terhadap regulasi. Dalam konteks pencegahan kecurangan laporan keuangan, Komite Audit berperan sebagai moderasi yang memastikan pelaporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Komite ini juga memantau pelaksanaan audit dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris berdasarkan hasil pengawasan untuk mengidentifikasi potensi manipulasi atau ketidakjujuran dalam laporan keuangan. Dengan pengawasan dan rekomendasi yang diberikan, Komite Audit menjadi elemen penting dalam menciptakan tata kelola perusahaan yang transparan dan akuntabel Tuti (2012)

Mekanisme ini berperan penting dalam meningkatkan kinerja perusahaan dan mengendalikan potensi kecurangan. Semakin baik implementasi GCG, semakin kuat pula pengawasan terhadap operasional perusahaan. Sebaliknya, lemahnya penerapan GCG akan berdampak buruk pada efektivitas perusahaan.

2.1.7 Sektor Konstruksi di Bursa Efek Indonesia (BEI)

Industri konstruksi memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, terutama melalui pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas pemerintah. Namun, ditemukan bahwa perusahaan di sektor ini menghadapi tantangan signifikan terkait transparansi dan akurasi laporan keuangan, hal tersebut dipengaruhi oleh kompleksitas proyek infrastruktur, tingginya tingkat leverage keuangan, dan fluktuasi harga material.

Penelitian Pastowo et al. (2024) mengungkapkan bahwa laporan keuangan dari perusahaan konstruksi, khususnya BUMN, menunjukkan risiko *financial distress* yang mengkhawatirkan, seperti rasio DER (*Debt to Equity Ratio*) yang tinggi dan arus kas operasional negatif. Selain itu, struktur pasar yang oligopoli ketat, di mana empat perusahaan BUMN mendominasi lebih dari 80% pangsa pasar, menciptakan lingkungan persaingan yang tidak ideal dan meningkatkan kemungkinan manipulasi laporan keuangan Dinarjito (2022).

Kecurangan laporan keuangan dalam industri ini salah satunya dipicu oleh tekanan untuk menunjukkan kinerja yang baik kepada pemegang saham dan memenuhi target proyek yang ambisius. Penelitian ini tidak hanya relevan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi, tetapi juga untuk meningkatkan kepercayaan investor dalam sektor konstruksi yang memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

NO	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
1	Nugroho Inggil, Murtanto	Pengaruh Hexagon, Internal Control, dan Financial Distress terhadap Pendeteksian Kecurangan Laporan Keuangan		Berpengaruh positif: Opportunity Berpengaruh negatif: Pressure dan Financial Distress. Tidak berpengaruh: Variabel Rationalization, Capability, Arrogance, dan Internal Control
2	Fadhilla Clarissa Putri, Hermi	Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Kecurangan Laporan Keuangan (Perusahaan Sektor Non-Siklis di BEI 2020–2021)	Independen: Pressure, Opportunity, Rationalization, Capability, Arrogance, Collusion. Dependen: Fraudulent Financial Statement	Berpengaruh positif: Pressure, Opportunity, dan Arrogance. Tidak berpengaruh: Rationalization, Capability, dan Collusion.
3	Cindy Kartika Dewi, Anik Yuliati	Pengaruh Fraud Hexagon terhadap Kecurangan Laporan Keuangan	Independen: External Pressure, Nature of Industry, Change in Auditor, Change in Director, Frequent Number of CEO's Picture, Political Connection. Dependen: Kecurangan laporan keuangan	Berpengaruh negatif: External pressure, nature of industry, dan political connection Berpengaruh positif: Change in director dan frequent number of CEO's picture. Tidak berpengaruh: Change in auditor
4	Kordianus Larum, Diana Zuhroh, dan Edi Subiyantoro	Fraudulent Financial Reporting: Menguji Potensi Kecurangan Pelaporan Keuangan dengan Menggunakan Teori Fraud Hexagon	Tekanan (pressure): Financial stability, external pressure. Kemampuan (capability): Kompetensi manajemen. Arogansi dan	Berpengaruh signifikan: Tekanan, kemampuan, dan arogansi. Tidak berpengaruh: rasionalisasi, peluang, dan kolusi.

NO	Peneliti	Peneliti Judul		Hasil
			kolusi: Pergantian direktur, auditor, atau adanya kerja sama ilegal.	
5	Shinta Permata Sari, Nanda Kurniawan Nugroho	Financial Statements Fraud dengan Pendekatan Vousinas Fraud Hexagon Model: Tinjauan pada Perusahaan Terbuka di Indonesia	Independen: Fraud Hexagon: Stimulus, Peluang, Arogansi, Kolusi, Kapabilitas, Rasionalisasi. Dependen: Kecurangan laporan keuangan	Berpengaruh: Stimulus (personal financial needs, Peluang (nature of indutry), Arogansi, dan Kolusi. Tidak berpengaruh: Stimulus, kapabilitas, dan rasionalisasi
6	Suci Oktavia, Asniati Bahari, rayna Kartika	Pengaruh Elemen Fraud Hexagon Theory Terhadap Fraud Laporan Keuangan	Independen: Fraud Hexagon: Stimulus, Peluang, Arogansi, Kolusi, Kapabilitas, Rasionalisasi. Dependen: Kecurangan laporan keuangan	Berpengaruh signifikan: Financial stability, external pressure, dan arogansi. Tidak berpengaruh: financial target, pergantian direksi, pengawasan yang tidak efektif, rasionalisasi, dan kolusi.
7	Febrina Thogamas Putri	Pengaruh Financial Distress Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi	Independen: Financial distress Dependen: Kecurangan Laporan Keuangan Moderasi: GCG	Berpengaruh signifikan: Financial distress Hubungan moderasi: GCG memperkuat
8	Resky Pratama, Windhy Puspitasari	Pengaruh Financial Distress Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan	Independen: Financial distress Dependen: Kecurangan Laporan Keuangan	Berpengaruh signifikan: Financial distress
9	Reza Adi Putra, Vinol Herawaty	Faktor-Faktor Memengaruhi Kecurangan Laporan Keuangan Dimoderasi Oleh Keefektifan Komite Audit Dalam Perspektif Fraud Hexagon	Independen: Fraud Hexagon Dependen: Kecurangan Laporan Keuangan Moderasi: Komite audit	Berpengaruh positif: peluang (pengawasan tidak memadai), rasionalisasi (pergantian auditor), citra CEO (proksi arogansi), dan kolusi. Tidak berpengaruh (pengaruh kecil): Kemampuan (perubahan) dan stimulus dengan target keuangan. Moderator negatif: komite audit

NO	Peneliti	Judul		Variabel	Hasil
10	Agus	Moderasi	Komite	Independen: Target	Berpengaruh: Target
	Dwianto,	Audit	sebagai	keuangan,	keuangan.
	Diana	Peredam		rasionalisasi,	Tidak berpengaruh:
	Puspitasari,	Kecurangan	1	tekanan pihak luar,	Stabilitas keuangan,
	Erma	Laporan Ke	uangan	pengawasan, sifat	rasionalisasi, tekanan
	Setiawati			industri, pergantian	pihak luar, pengawasan,
				auditor, pergantian	sifat industri, pergantian
				direksi, frekuensi	auditor, pergantian
				kemunculan	direksi, dan frekuensi
				gambar CEO.	kemunculan gambar CEO.
				Dependen:	Peran Moderasi:
				Fraudulent	Berpengaruh (target
				Financial	keuangan dan tekanan
				Reporting	pihak luar)
				Moderasi: Komite	Tidak Berpengaruh
				Audit	(Stabilitas keuangan,
					rasionalisasi, pengawasan,
					sifat industri, pergantian
					auditor, pergantian
					direksi, dan frekuensi
					kemunculan gambar
					CEO).
				W C	CEO).

2.3 Kerangka Penelitian

2.3.1 Kerangka Pemikiran

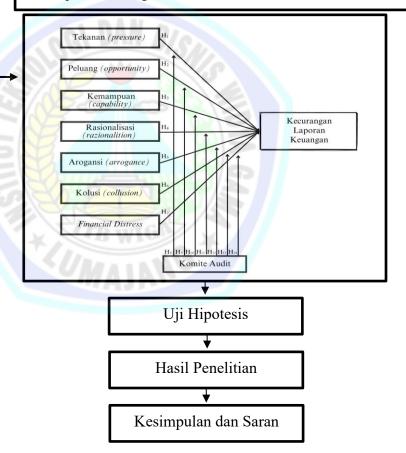
Kerangka pemikiran adalah gambaran konseptual yang menjelaskan hubungan antar variabel dalam suatu penelitian, kerangka pemikiran ini dibuat berdasarkan teori, penelitian terdahulu, dan logika untuk menjawab pertanyaan penelitian atau pengujian hipotesis. Pada umumnya, diwujudkan dalam sebuah narasi yang terstruktur dan disertai bagan atau diagram untuk memperjelasan hubungan antar variabel.

Kerangka pemikiran pada penelitian ini digambarkan dengan hubungan antara fraud hexagon dan financial distress terhadap kecurangan laporan keuangan dengan Komite Audit sebagai moderasi. Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan, berikut adalah kerangka pemikiran dari penelitian ini:

Agency Theory. Jensen & Meckling (1976)

Penelitian Tedahulu

- 1. Pengaruh Fraud Hexagon, Internal Control, dan Financial Distress terhadap Pendeteksian Kecurangan Laporan Keuangan
- 2. Pengaruh *Fraud Hexagon* terhadap Kecurangan Laporan Keuangan
- 3. Fraudulent Financial Reporting: Menguji Potensi Kecurangan Pelaporan Keuangan dengan Menggunakan Teori Fraud Hexagon.
- 4. Faktor-faktor Memengaruhi Kecurangan Laporan Keuangan Dimoderasi Oleh Keefektifan Komite Audit dalam Perspektif *Fraud Hexagon*
- 5. Moderasi Komite Audit sebagai Peredam Kecurangan Laporan Keuangan.



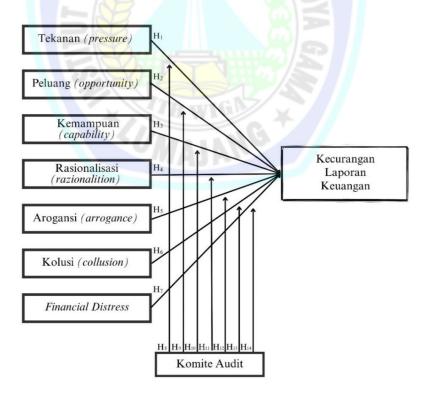
Gambar 2.2 Kerangka pemikiran

Sumber: Hasil data peniliti

2.3.2 Kerangka Konseptual

Varibel dependen dalam penelitian ini menggunakan kecurangan laporan keuangan. Menurut Sugiyono 2019 dalam Suwarsa (2021) variabel independent merupakan variabel yang memengaruhi atau menjadi penyebab terjadinya perubahan pada variabel dependen.

Penelitian ini memiliki tujuh variabel independen, yaitu tekanan, peluang, kesempatan, rasionalisasi, arogansi, kolusi, dan *financial distress*. Menurut Sugiyono, variabel moderasi adalah variabel yang memengaruhi hubungan antara variabel independen dan dependen, baik dengan memperkuat maupun memperlemah. Dalam penelitian ini, variabel moderasi yang digunakan adalah Komite Audit.



Gambar 2.3 Kerangka Konseptual

Sumber: Hasil data peniliti

Berdasarkan kerangka konseptual diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaruh dari variabel independen, tekanan (X_1) , peluang (X_2) , kesempatan (X_3) , rasionalisasi (X_4) , arogansi (X_5) , kolusi (X_6) , dan *financial distress* (X_7) terhadap variabel dependen, yaitu kecurangan laporan keuangan (Y), dengan Komite Audit (Z) sebagai variabel moderasi.

2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah suatu penjelasan sementara tentang prilaku, fenomena, atau keadaan terentu yang telah terjadi atau akan terjadi. Jawaban sementara terhadap perumusan masalah dalam sebuah penelitian dapat disebut hipotesis menurut Sugiyono, 2009 dalam penelitian Rondius (2012). Dimana rumusan masalah penelitian sudah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan.

Hipotesis juga dapat diartikan sebuah hubungan logis antara dua atau lebih variabel berdasarkan toeri yang masih perlu diuji kembali kebenaranya. Pengujian berulang atas hipotesis yang sama akan semakin memperkuat teori yang mendasari atau dapat juga sebaliknya, yaitu tertolak Paramita et al. (2021).

Perumusan pada hipotesis penelitian ini berdasarkan teori dan penelitianpenelitian terdahulu yang bertujuan untuk menguji pengaruh variabel-variabel independen terhadap penghindaran pajak.

2.4.1 Pengaruh Tekanan terhadap Kecurangan Laporan Keuangan

Tekanan eksternal dalam perusahaan dapat mendorong kecurangan laporan keuangan, terutama saat perusahaan bergantung pada utang untuk pembiayaan atau modal Aprilia, (2017). Dalam penelitian ini, tekanan diukur menggunakan *external pressure*, dengan rasio utang sebagai proksi risiko kredit perusahaan. Kondisi

leverage yang tinggi mencerminkan ketergantungan pada utang, di mana DAR menunjukkan dominasi utang dalam pembiayaan aset, sementara DER menandakan ketergantungan pada pinjaman dibanding modal sendiri. Menurut SAS No.99 menyatakan bahwa risiko kecurangan meningkat saat manajemen menghadapi tekanan berlebihan untuk memenuhi kewajiban pihak ketiga.

Tekanan eksternal memiliki pengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan, terutama ketika stabilitas keuangan terganggu. Penelitian lain oleh Saifudin et al. (2020) juga menunjukkan bahwa manajemen yang menghadapi tekanan besar dari kreditor cenderung memanipulasi laporan keuangan untuk mempertahankan citra kinerja yang baik. Selain itu, studi oleh Pramurza (2024) menyimpulkan bahwa tekanan eksternal menjadi salah satu faktor utama yang mendorong manipulasi laporan keuangan, karena manajemen berusaha memenuhi ekspektasi pihak eksternal di tengah sistem pengawasan yang tidak efektif.

Tekanan eksternal yang diukur melalui rasio *leverage* (*debt to asset ratio* atau *debt to equity ratio*) menjadi salah satu indikator signifikan dalam memprediksi risiko kecurangan laporan keuangan. Berdasarkan temuan ini, hipotesis yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah:

H₁: Tekanan memiliki pengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan.

2.4.2 Pengaruh Peluang terhadap Kecurangan Laporan Keuangan

Elviani menyatakan bahwa untuk terjadinya *fraud* perlu adanya sebuah kesempatan, sebagaimana tertuang dalam jurnal Oktavia et al. (2022). Seseorang cenderung melakukan kecurangan jika terdapat kesempatan atau celah yang

memungkinkan hal tersebut terjadi. Oleh karena itu, salah satu indikator untuk mengukur peluang *(opportunity)* adalah kelemahan dalam pengawasan terhadap pengendalian kinerja perusahaan *(ineffective monitoring)*.

Ineffective monitoring terjadi ketika pengawasan dari dewan komisaris atau komite audit tidak optimal, sehingga manajemen memiliki keleluasaan lebih besar dalam mengelola dan melaporkan informasi keuangan tanpa deteksi yang memadai. Individu dengan akses eksklusif terhadap informasi keuangan memiliki peluang lebih besar untuk melakukan manipulasi, terutama dalam pencatatan akuntansi yang kompleks dan penggunaan discretionary accruals.

Pernyataan yang diperoleh melalui penelitian yang dilakukan Putri & Hermi, (2023); Nugroho & Murtanto (2024) terdapat pengaruh positif antara *opportunity* terhadap kecurangan laporan keuangan. *Opportunity* diukur melalui kelemahan pengawasan *(ineffective monitoring)*, yang menjadi sinyal bagi individu dengan akses atau kontrol tertentu untuk melakukan kecurangan.

Kasus nyata oleh PT Waskita Karya (2023) menjadi bukti nyata bahwa lemahnya sistem pengawasan membuka celah bagi manipulasi laporan keuangan yang dapat merugikan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, semakin lemah pengawasan dan kontrol internal dalam perusahaan, semakin besar peluang bagi individu dalam organisasi untuk melakukan kecurangan demi keuntungan pribadi atau mempertahankan citra perusahaan. Berdasarkan temuan ini, hipotesis yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah:

H₂: Peluang memiliki pengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan.

2.4.3 Pengaruh Kemampuan terhadap Kecurangan Laporan Keuangan

Kemampuan dalam *Fraud Hexagon* merujuk pada kapasitas seseorang dalam perusahaan untuk melakukan *fraud*, yang biasanya terkait dengan posisi, wewenang, dan ketrampilan khusus yang dimiliki oleh individu tersebut. Menurut Wolfe & Hermanson dalam penelitian Nugroho & Murtanto (2024) individu dianggap memiliki kemampuan jika perannya memungkinkan manipulasi laporan keuangan dan tidak dapat dengan mudah digantikan oleh bagian lain dalam organisasi.

Direksi, sebagai pengambil keputusan utama, memiliki akses luas terhadap laporan keuangan dan dapat memanipulasi data tanpa mudah terdeteksi, terutama jika sistem pengawasan lemah. Pergantian direksi sering kali menjadi indikator potensi *fraud*, karena dapat menandakan upaya untuk menutupi kecurangan sebelumnya atau memperbaiki kinerja yang buruk akibat manipulasi laporan keuangan.

Menurut Larum et al. (2021), pergantian direksi terjadi karena kinerja yang kurang optimal, yang bisa menjadi sinyal adanya manipulasi. Selain itu, penelitian Novitasari dan Chariri dalam Novarina & Triyanto (2022) menunjukkan bahwa perubahan direksi dapat menciptakan masa transisi (*stress period*), di mana efektivitas pengawasan menurun, sehingga membuka celah bagi kecurangan.

Studi oleh Aviantara (2021) juga mendukung bahwa individu yang memegang jabatan tinggi dalam perusahaan memiliki kesempatan lebih besar untuk melakukan fraud dengan memanfaatkan wewenangnya. Dengan demikian, semakin besar kemampuan individu dalam mengontrol laporan keuangan, serta semakin sering

terjadi pergantian direksi, maka semakin tinggi risiko kecurangan laporan keuangan akibat celah pengawasan dan stabilitas tata kelola yang terganggu. Berdasarkan temuan ini, hipotesis yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah:

H₃: Kemampuan memiliki pengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan.

2.4.4 Pengaruh Rasionalisai terhadap Kecurangan Laporan Keuangan

Rasionalasisi merujuk pada sikap pembenaran diri, individu yang melakukan kecurangan cenderung membenarkan tindakannya sebagai sesuatu yang wajar. Rasionalisasi ini dapat diukur melalui keberadaan pergantian Kantor Akuntan Publik (KAP) atau pergantian auditor (change in auditor), yang dapat menjadi sinyal adanya usaha perusahaan untuk menghindari deteksi kecurangan selama periode pengamatan. Auditor memiliki peran penting dalam memastikan transparansi laporan keuangan, sehingga pergantian auditor yang terlalu sering dapat menunjukkan bahwa perusahaan berusaha mengganti auditor yang lebih kritis dengan auditor yang lebih longgar dalam pengawasan.

Studi oleh Jihan Octani et al. (2022) menyatakan bahwa rasionalisasi tidak berpengauh terhadap kecurangan laporan keuangan. Jika dipertimbangkan melalui logika oleh kasus yang pernah terjadi sebelumnya dan adanya kondisi pergantian auditor dilakukan perusahaan untuk mencegah deteksi kecurangan oleh auditor baru, bukan sekedar alasan profesional atau administratif. Pergantian auditor memungkinkan perusahaan untuk memeanfaatkan auditr baru yang belum sepenuhnya memahami pola pencataan keuangan sebelumnya, sehingga dirasa lebih mudah bagi manajemen untuk melajutkan atau menutupi praktik kecurangan.

Menurut penulis, hasil penelitian sebelumnya kurang akurat jika dibandingkan dengan kondisi di lapangan. Oleh karena itu, rasionalisasi melauli pergantian auditor dapat menjadi strategi perusahaan dalam memanipulasi laporan keuangan secara lebih halus dan sulit terdeteksi. Berdasarkan temuan tersebut, hipotesis yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah:

H₄: Rasionalisasi memiliki pengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan.

2.4.5 Pengaruh Arogansi terhadap Kecurangan Laporan Keuangan

Arogansi merupakan tambahan elemen saat pengembangan *fraud diamond* menjadi *fraud* pentagon yang ditemukan oleh Crowe Horwarth, 2010. Arogansi merupakan perilaku yang mencerminkan sikap superior dengan kekurangan dalam kesadaran akan sifat serakah yang dimiliki, serta kurangnya pemahaman bahwa aturan berlaku untuk semua pihak yang terlibat dalam perusahaan.

Variabel arogansi dalam penelitian ini akan diproksikan dengan frekuensi kemunculan foto CEO (frequent number of CEO's picture). Penggunaan proksi tersebut sesuai denga hasil penelitian oleh Putri & Hermi (2023), bahwa arogansi memiliki pengaruh positif melalui intensitas kemunculan gambar direktur dalam laporan tahunan. Hasil tersebut juga sesuai dengan penelitian terdahulu oleh Arizanda Rahayu et al., (2024) menunjukkan bahwa frequent number of CEO's picture dalam laporan tahunan, semakin besar kemungkinan perusahaan mengalami manipulasi laporan keuangan.

CEO yang sering muncul dalam laporan tahunan dengan jumlah foto yang berlebihan mencerminkan sebuah upaya membangun citra kepemimpina yang dominan. Semakin banyak foto yang ditampilkan, semakin menunjukkan ego tinggi serta keinginan CEO untuk mendapatkan pengakuan personal dan mengendalikan presepsi publik terhadap perusahaan. Selain itu, frekuensi kemunculan gambar CEO juga dapat mengindikasikan adanya kontrol yang lebih besar terhadap informasi perusahaan, termasuk bagaimana perusahaan dipresentasikan kepada para pemangku kepentingan. Berdasarkan temuan tersebut, hipotesis yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah:

H5: Arogansi memiliki pengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan.

2.4.6 Pengaruh Kolusi terhadap Kecurangan Laporan Keuangan

Kolusi dapat mengacu pada skema kerjasama tidak etis antara dua pihak atau lebih untuk melakuka kecurangan, yang seringkali terjadi dalam bentuk hubungan politik (political connection) antara perusahaan dengan pemerintah. Dalam konteks ini, perusahaan yang bekerja sama dalam proyek pemerintah seringkali memiliki insentif tinggi untuk memanipulasi laporan keuangan guna menampilkan kinerjja terbaik agar tetap memperoleh kontrak di masa depan. Penelitian yang dilakukan oleh Jannah et al., (2021) menemukan bahwa perusahaan yang memiliki hubungan politik cederung lebih berupaya menyesuakan laporan keuangan agar memenuhi ekspektasi mitra pemerintah.

Kolusi meningkatkan risiko kecurangan karena perusahaan dengan akses eksklusif ke proyek pemerintah lebih mudah menyembunyikan informasi keuangan, terutama dalam proyek besar yang sulit diaudit. Koneksi politik juga menciptakan konsentrasi kekuasaan yang melemahkan pengawasan, sehingga

meningkatkan peluang manipulasi laporan keuangan. Semakin kuat kolusi, semakin besar risiko *fraud* akibat perlindungan dari pihak eksternal yang seharusnya bersikap independen. Berdasarkan temuan tersebut, hipotesis yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah:

H6: Kolusi memiliki pengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan.

2.4.7 Pengaruh Financial Distress terhadap Kecurangan Laporan Keuangan

Menurut Yustika (2015), dalam penelitian Dira et al. (2022) financial distress adalah kondisi penurunan kinerja keuangan perusahaan yang mengarah pada krisis atau ketidakmampuan memenuhi kewajiban keuangan. Kondisi di mana perusahaan mengalami kesulitan keuangan yang muncul sebelum mencapai tahap likuidasi atau kebangkrutan Annafi & Yudowati (2021). Dengan begitu, financial distress perlu dipertimbangkan dalam mendeteksi adanya kecurangan laporan keuangan.

Mengacu pada peneliitian Putri Thogamas & Hariadi (2023); Pratama & Puspitasari (2022) yang menyatakan bahwa *financial distress* berpengauh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Pada penelitian tersebut dapat dilihat *financial distress* mendorong terjadinya kecurangan laporan keuangan karena manajemen berupaya memanipulasi angka agar perusahaan tampak sehat. Tekanan dari kreditor dan investor memperburuk situasi, mendorong penggunaan *earnings management* atau pemalsuan laporan keuangan untuk menghindari kebangkrutan. Sebaliknya, perusahaan yang stabil secara finansial tidak menghadapi tekanan serupa, sehingga risiko *fraud* lebih kecil. Semakin tinggi *financial distress*, semakin

besar insentif manajemen untuk melakukan kecurangan demi menjaga citra dan kelangsungan bisnis. Berdasarkan temuan tersebut, hipotesis yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah:

H7: Financial distress memiliki pengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan.

2.4.8 Peran Komite Audit Memoderasi Pengaruh Tekanan terhadap

Kecurangan Laporan Keuangan

Standar Audit No. 99 menjelaskan bahwa tekanan dari pihak ketiga, seperti kewajiban perusahaan untuk melunasi utang, dapat menciptakan tekanan besar bagi manajemen. Dalam situasi tersebut, manajemen mungkin tergoda untuk melanggar aturan akuntansi demi memenuhi ekspektasi. Selain itu, kebutuhan keuangan pribadi juga dapat meningkatkan risiko penipuan. Oleh karena itu, keberadaan Komite Audit sangat penting sebagai mekanisme pengawasan untuk memastikan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas perusahaan tidak melakukan kesalahan dalam pelaporan keuangan dan meminimalkan potensi kecurangan.

Studi oleh Mardiana & Jantong (2020) hubungan *external pressure* terhadap *Fraudulent financial reporting* diperkuat keberadaan Komite Audit. Memiliki Komite Audit dalam sebuah perusahaan dapat membantu menghentikan manajamen melakukan hal – hal yang bertentangan. Berdasarkan temuan tersebut, hipotesis yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah:

H8: Komite Audit memoderasi hubungan tekanan terhadap kecurangan laporan keuangan.

2.4.9 Peran Komite Audit Memoderasi Pengaruh Peluang terhadap Kecurangan Laporan Keuangan

Pada penelitian Aprilia (2017) menyatakan bahwa ketidakefektifan pengawasan berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Namun berbeda dengan studi yang dilakukan oleh Salsabila Kautsar & Andhaniwati (2024) Komite Audit tidak efektif dalam memoderasi pengaruh *ineffective monitoring* terhadap kecurangan laporan keuangan, karena keinginan kuat untuk curang dapat mengatasi pengawasan, bahkan yang ketat. Berdasarkan temuan tersebut, hipotesis yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah:

H9: Komite Audit memoderasi hubungan peluang terhadap kecurangan laporan keuangan.

2.4.10 Peran Komite Audit Memoderasi Pengaruh Kemampuan terhadap Kecurangan Laporan Keuangan

Menurut Wolfe & Hermanson, 2024 dalam penelitian Putra & Herawaty (2023), *Chief Executive Officer (CEO), Board of Directors*, dan *Head of Divisions* rentan terhadap penipuan karena hak istimewa mereka memungkinkan untuk memengaruhi orang lain dan memanfaatkan situasi demi melancarkan kecurangan, kapabilitas ini diproksikan melalui perubahan direksi.

Komite Audit bertugas mengevaluasi praktik manajemen risiko yang dijalankan oleh direktur serta mengawasi tindakan yang diambil direktur sebagai respons terhadap temuan audit internal. Kemampuan Komite Audit dalam aspek keuangan berperan penting dalam mengurangi risiko kecurangan pada laporan keuangan Sijabat & Tamba (2021). Komite Audit diharapkan dapat mendeteksi

kapabilitas direktur dalam melakukan kecurangan pada laporan keuangan perusahaan. Berdasarkan temuan tersebut, hipotesis yang dapat diajukan dalam penelitIan ini adalah:

H10: Komite Audit memoderasi hubungan kemampuan terhadap kecurangan laporan keuangan.

2.4.11 Peran Komite Audit Memoderasi Pengaruh Rasionalisasi terhadap Kecurangan Laporan Keuangan

Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) menyatakan bahwa keberadaan Komite Audit bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengawasan internal perusahaan dan mengoptimalkan mekanisme *checks and balances*. Dengan demikian, pemegang saham dan stakeholder dapat memperoleh perlindungan maksimal terhadap informasi perusahaan.

Komite Audit juga berperan sebagai penghubung antara auditor eksternal dan perusahaan, memastikan laporan keuangan yang merupakan hasil kerja manajemen telah diverifikasi dengan baik oleh auditor eksternal. Studi Albercht et al dalam penelitian Putra & Herawaty (2023) menyatakan adanya pengawasan ketat oleh komisaris independen dan Komite Audit terhadap manajemen perusahaan dapat mengurangi tindakan kecurangan dengan mendeteksi penggelapan dalam laporan keuangan.

Pergantian auditor sering dilakukan perusahaan untuk mendukung tindakan rasionalisasi Hadi et al. (2021). Semakin sering perusahaan mengganti auditor, tingkat kecurangan yang terjadi diduga semakin tinggi. Berdasarkan temuan tersebut, hipotesis yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah:

H11: Komite Audit memoderasi hubungan rasionalisasi terhadap kecurangan laporan keuangan.

2.4.12 Peran Komite Audit Memoderasi Pengaruh Arogansi terhadap

Kecurangan Laporan Keuangan

Sikap superioritas yang menyebabkan keserakahan dari orang yang percaya bahwa pengendalian internal tidak berlaku secara pribadi, merasa lebih tinggi kedudukannya ketimbang pihak lainnya biasa disebut dengan arogansi. Menurut hasil studi oleh Aprilia, (2017) jumlah gambar CEO dalam laporan tahunan perusahaan merupakan indikator yang efektif untuk mengukur tingkat arogansi CEO. Kondisi seorang manajer yang sering menampilkan foto dirinya dalam laporan tahunan dianggap memiliki sikap arogansi dan superioritas. Ketika manajer merasa dirinya superior dan tidak ada yang berani menentang, ia mungkin merasa bebas untuk melakukan kecurangan tanpa takut terdeteksi.

Peran penting dari Komite Audit dan Dewan Komisaris adalah berkolaborasi untuk mengawasi perilaku manajemen yang berlebihan dengan tujuan memverifikasi kepatuhan manajer terhadap peraturan yang berlaku dan memelihara tata kelola berusahaan yang sehat Tasya Kamila & Aina Zahra Parinduri (2023). Berdasarkan temuan tersebut, hipotesis yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah:

H12: Komite Audit memoderasi hubungan arogansi terhadap kecurangan laporan keuangan.

2.4.13 Peran Komite Audit Memoderasi Pengaruh Kolusi terhadap Kecurangan Laporan Keuangan

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN mengatur bahwa GCG memberikan panduan bagi komisaris dan direksi dalam mengambil keputusan serta melaksanakan tindakan dengan berpegang pada standar moral yang tinggi, mematuhi hukum yang berlaku, dan secara konsisten menyadari kewajiban sosial perusahaan terhadap berbagai pihak yang berkepentingan.

Kolusi yang mungkin terjadi dalam kerja sama perusahaan dengan pemerintah dapat diminimalkan melalui peran Komite Audit yang efektif dalam mengawasi dan memastikan transparansi laporan keuangan Tasya Kamila & Aina Zahra Parinduri (2023). Berdasarkan temuan tersebut, hipotesis yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah:

H13: Komite Audit memoderasi hubungan kolusi terhadap kecurangan laporan keuangan.

2.4.14 Peran Komite Audit Memoderasi Pengaruh *Financial Distress* terhadap Kecurangan Laporan Keuangan

Semakin baik mengimplementasikan good corporate governance maka semakin kecil perusahaan mengalami kondisi financial distress. Menurut Ariyanto dalam studi penelitian Putri Thogamas & Hariadi, (2023), bahwa Komite Audit memperkuat pengaruh positif financial distress terhadap earning management, yang digunakan sebagai indikator variabel dependen dan moderasi. Temuan ini

mengindikasikan bahwa penerapan Good Corporate Governance (GCG) di Indonesia masih sebatas pemenuhan kerangka hukum dasar dan belum efektif dalam mencegah kecurangan laporan keuangan. Berdasarkan temuan tersebut, hipotesis yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah:

H14: Komite Audit memoderasi hubungan *financial distress* terhadap kecurangan laporan keuangan.

